

Judul : Usulan IDI standar gaji dokter, senayan ingin kesejahteraan tenaga medis juga meningkat
Tanggal : Kamis, 03 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Usulan IDI Soal Standar Gaji Dokter **Senayan Ingin Kesejahteraan Tenaga Medis Juga Meningkatkan**

Senayan mendorong Pemerintah memperkuat kebijakan kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) dengan pertimbangan standar penghasilan yang layak bagi dokter maupun nakes lain. Hal itu demi menjaga kualitas pelayanan medis kepada seluruh masyarakat tetap optimal.

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan, pihaknya menanggapi usulan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengenai standar penghasilan minimum dokter. IDI mengusulkan ke Pemerintah memberikan gaji sekitar Rp 34 juta untuk dokter umum puskesmas, Rp 30 juta dokter umum rumah sakit, serta Rp 110 juta dokter spesialis.

Menurutnya, tuntutan dokter itu didasarkan pada panjangnya proses pendidikan, tingkat kompetensi, serta besarnya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Tapi perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan nakes tidak boleh berhenti pada profesi dokter saja, tapi harus mencakup seluruh profesi lainnya," katanya di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dia juga mengingatkan agar organisasi-organisasi profesi lain seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) turut menyusun standar penghasilan minimum profesi masing-masing. Langkah itu memberikan acuan yang lebih jelas bagi Pemerintah. Terutama untuk memastikan tingkat kesejahteraan seluruh nakes agar merata.

Nakes, kata Charles, merupakan sosok yang sangat dibutuhkan dalam setiap situasi. Tidak seharusnya mereka hanya dianggap sebagai pahlawan saat ada wabah lalu dilupakan ketika keadaan normal. "Makanya kami berharap Pemerintah memperhatikan sungguh-sungguh apa yang jadi usulan IDI, maupun organisasi profesi lainnya di kemudian hari," ujarnya.

Berikutnya, dia juga meminta



Charles Honoris

kondisi nakes yang bekerja di fasilitas pelayanan milik Pemerintah Pusat maupun Pemda mendapat perhatian khusus. Karena masih ditemukan adanya nakes yang hanya menerima penghasilan ratusan ribu rupiah tiap bulan. Itu menunjukkan masih rendahnya penghargaan terhadap pengabdian mereka di lapangan.

Selain persoalan penghasilan pokok, tunjangan nakes di sejumlah daerah ternyata tidak lagi dibayarkan secara penuh oleh Pemda tempat mereka mengabdikan

Beberapa laporan yang masuk malah menunjukkan ada tenaga kesehatan yang hak tunjangan hanya dibayarkan 50 persen. Bahkan, ada juga yang tidak menerimanya selama beberapa bulan.

Kondisi itu terjadi akibat keterbatasan fiskal imbas berkurangnya alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada Pemda. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat didesak segera mengambil peran lebih besar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Agar seluruh hak dan kesejahteraan nakes tetap terpenuhi," tegasnya.

Dia berharap, kebijakan itu bisa mulai terlihat dalam penyusunan APBN 2027. Ketika Pemerintah Pusat mengambil sebagian kemampuan fiskal daerah melalui kebijakan transfer, maka kebutuhan dasar pelayanan publik harus didukung. Dana yang ditarik dari daerah mesti dikembalikan guna membiayai kesejahteraan nakes di lapangan.

Perhatian yang serius terhadap kesejahteraan nakes merupakan bagian utama dalam penguatan sistem kesehatan nasional. Melalui

penghasilan serta perlindungan yang lebih layak, para tenaga kesehatan diharapkan mampu bekerja secara optimal. "Ini sekaligus memberikan pelayanan medis terbaik bagi masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air," ucapnya.

Menanggapi usulan itu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku akan segera membahasnya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini. Koordinasi juga dilakukan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk melihat kemampuan keuangan negara dalam merealisasikan usulan itu.

Budi bilang, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tunjangan khusus Rp 30 juta untuk dokter spesialis di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Untuk saat ini, pihaknya berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemenkeu, serta mengusulkan tunjangan dokter gigi karena tingginya masalah gigi dalam program Cek Kesehatan Gratis. ■ **PVB**